

---

## **KOMUNIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM KONFLIK PROYEK GEOTHERMAL DI DESA BATUKUWUNG, KABUPATEN SERANG**

**Yayan Saryani<sup>1</sup>, Naniek Afrilla Framanik<sup>2</sup>, Ail Muldi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

<sup>1</sup> Email: yasa150687@gmail.com

---

### **Kata kunci :**

Pemetaan Sosial,  
Konflik dan  
Komunikasi  
*Stakeholders*.

---

### **Abstrak**

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Desa Batukuwung, Kabupaten Serang yang dijalankan oleh PT. Sintesa Banten Geothermal merupakan salah satu proyek nasional yang sampai saat ini masih belum berjalan karena masih mendapat penolakan dari masyarakat di lokasi pembangunan dan menciptakan terjadinya konflik kepentingan antar *stakeholder* yang terlibat. Sehingga untuk memetakan konflik kepentingan yang terjadi dan alur skema komunikasi pada konflik pembangunan PLTPB di Desa Batukuwung menjadi menarik untuk dikaji. Inilah yang kemudian menjadi dasar penelitian ini dilakukan. Waktu penelitian sendiri berlangsung dari bulan Oktober 2022 - Juni 2023. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan teknik pemetaan sosial. Berdasarkan hasil kajian setiap *stakeholders* yang terlibat dalam konflik yang terjadi saling terhubung antara satu sama lain dan saling mempengaruhi yang ditandai dengan adanya garis koordinasi untuk *stakeholders* yang menolak pembangunan PLTPB dan ditandai dengan adanya skema komunikasi yang bersifat konvergen. Sedangkan untuk *stakeholders* yang menerima pembangunan PLTPB hubungan antar *stakeholders* ini selain ditunjukkan dengan garis koordinasi juga lebih bersifat vertikal (perintah dari atas kebawah), dimana skema komunikasi yang dijalankan lebih bersifat *divergen*.

---

### **Keywords :**

*Social Mapping,*  
*Conflict and*  
*Stakeholder*  
*Communication*

---

### **Abstract**

*Construction of a Geothermal Power Plant (PLTPB) in Batukuwung Village, Serang Regency which is run by PT. The Banten Geothermal Synthesis is a national project that is still not underway because it is still being rejected by the community at the construction site and creates conflicts of interest between the stakeholders involved. So mapping the conflicts of interest that occurred and the flow of communication schemes in the PLTPB development conflict in Batukuwung Village would be interesting to study. This is what later became the basis for this research. The research period itself will take place from October 2022 - June 2023. Meanwhile, the method used is a qualitative research method using a case study approach and social mapping techniques. Based on the results of the study, each stakeholder involved in the conflict is connected to each other and influences each other, which is marked by the existence of a coordination line for stakeholders who reject the development of the PLTPB and is marked by the existence of a convergent communication scheme. Meanwhile, for stakeholders who accept the construction of the PLTPB, the relationship between these stakeholders is not only shown by lines of coordination but is also more vertical (orders from top to bottom), where the communication scheme implemented is more divergent.*

## PENDAHULUAN

Kebutuhan akan listrik saat ini menjadi salah satu kebutuhan primer setiap orang. Hal ini karena hampir setiap peralatan yang digunakan untuk mempermudah kerja maupun mencukupi kebutuhan hampir seluruhnya menggunakan energi listrik. Terlebih di era digital saat ini hampir seluruh kebutuhan harus ditopang dengan adanya listrik. Itulah sebabnya kebutuhan akan energi listrik ini semakin meningkat setiap tahunnya. Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat adalah dengan cara menggunakan energi panas bumi sebagai salah satu energi alternatif untuk menghasilkan tenaga listrik untuk menyuplai kebutuhan listrik nasional misalnya adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Kaldera Rawa Dano, Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Dimana pemegang proyek pembangunan PLTPB ini adalah PT. Sintesa Banten Geothermal (PT. SBG). Menurut humas PT. SBG bahwa melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah telah menyusun *road map* untuk menjalankan proyek panas bumi mengingat potensi panas bumi yang

dimanfaatkan secara nasional baru sebesar 8,9% dari target peningkatan 16,8% atau sebesar 7.241,5 MW. Sehingga, pengembangan dan eksplorasi panas bumi di Kecamatan Padarincang adalah amanat yang diberikan negara, di mana nantinya seluruh listrik yang dihasilkan oleh PT. SBG adalah 100% milik negara (PT. PLN Persero) dan merupakan objek vital negara (bantenhits.com, 2023).

Akan tetapi dalam kenyataannya proyek ini masih belum bisa terlaksana sampai dengan saat ini karena masih terganjal dengan penolakan masyarakat. Padahal pembangunan PLTPB tersebut merupakan program yang menjadi prioritas pemerintah melalui Permen ESDM No 2 Tahun 2010 (finance.detik.com, 2023). Proyek yang akan dijalankan ini dinilai oleh beberapa pihak akan berdampak buruk pada lingkungan. Di sisi lain upaya komunikasi yang dilakukan pihak perusahaan dalam meyakinkan masyarakat sekitar proyek pembangunan PLTPB juga masih belum sesuai harapan. Terlebih berbagai pertanyaan, dan tuntutan masyarakat sekitar terkait kekhawatiran dan jaminan keamanan dari dilaksanakannya proyek juga masih belum dapat dijawab oleh pihak

perusahaan, yang akhirnya melahirkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan.

Kondisi ini juga menjadi semakin buruk pada saat masyarakat merasa dibohongi karena apa yang disosialisasikan dengan dampak yang mereka rasakan saat ini jauh berbeda. Dimana menurut perusahaan bahwa proyek ini sangat aman untuk dijalankan terutama untuk lingkungan, padahal yang warga rasakan karena adanya proyek ini memunculkan dampak seperti banjir yang terjadi semakin parah, munculnya konflik baik horizontal maupun vertikal dan lain-lain. Kemudian pola komunikasi yang diterapkan perusahaan yang cenderung tertutup juga menjadikan warga semakin curiga dan tidak percaya terhadap perusahaan. Akibatnya muncul penolakan dan berujung pada konflik sosial yang sampai dengan saat ini belum terselesaikan. Terlebih cukup banyaknya aktor dan kelembagaan sosial yang terlibat dalam konflik ini menjadikan konflik yang terjadi semakin kompleks. Dimana setiap aktor sosial maupun kelembagaan ini membentuk kelompok konflik dan saling berebut kepentingan dalam konflik yang terjadi. Berdasarkan konflik yang terjadi pada proyek pembangunan Pembangkit

Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Desa Batukuwung, maka sangat menarik untuk mengkaji lebih dalam terkait bagaimana model komunikasi setiap pemangku kepentingan dalam setiap kelembagaan yang ikut berperan serta dalam terjadinya konflik. Berdasarkan hal ini maka beberapa permasalahan yang akan dikaji diantaranya adalah: (1) Bagaimana pemangku kepentingan dan kelembagaan yang menaungi konflik pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Desa Batukuwung ?; dan (2) Bagaimana skema komunikasi pada konflik pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Desa Batukuwung ?.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Coser dalam Wahyudi (2021) mendefinisikan konflik sosial sebagai perebutan nilai dan klaim atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka di mana tujuan lawannya adalah untuk menetralkan, melukai atau melenyapkan saingan mereka. Sementara Dewi (2019) mendefinisikan konflik sebagai perbedaan keyakinan, kepentingan, keinginan, keperluan, pujian, nilai, kekuasaan, status, sumber daya, tingkah laku, dan sasaran antara individu atau kelompok satu dengan

lainnya yang saling dipertentangkan. Selanjutnya Jannah, *et.al.*, (2022) mendefinisikan konflik sebagai bentuk perselisihan dan pertentangan yang terjadi di kehidupan antara dua atau lebih pihak. Takdir (2017) memahami konflik sebagai cerminan dari ketidakharmonisan antar individu atau antar kelompok yang memiliki perberbedaan keyakinan.

Kemudian Suporahardjo (2000) dalam Anshori (2013) menjelaskan bahwa sumber konflik ada karena adanya perbedaan yang bersifat mutlak. Perbedaan tersebut bisa terjadi pada tingkat: (1) persepsi; (2) pengetahuan; (3) tata nilai; (4) kepentingan; dan (5) pengakuan hak kepemilikan (klaim). Sementara Engel dan Korf (2005) dalam Anshori (2013) menyebutkan bahwa terdapat 4 penyebab konflik yang terjadi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) diantaranya adalah: (1) persaingan yang ketat dalam pemanfaatan SDA; (2) pertentangan yang terjadi antara hukum adat dan hukum positif; (3) perubahan terkait dengan perubahan kepentingan dan kebutuhan penggunaan SDA, (4) kebijakan, program, kegiatan pengelolaan SDA yang sering menjadi sumber konflik, karena kebijakan sering ditentukan tanpa partisipasi, identifikasi

dan konsultasi pemangku-kepentingan yang sering tidak tepat, penyampaian informasi yang tidak tepat, kapasitas kelembagaan yang tidak memadai, pemantauan dan evaluasi atas program, kegiatan tidak memadai sehingga mempersulit identifikasi dan penyelesaian masalah yang terjadi.

Kemudian untuk jenis-jenis konflik sendiri terdapat cukup banyak jenisnya bergantung darimana sudut pandang peneliti melihatnya. Anshori (2013) dalam bukunya membagi jenis konflik berdasarkan aspek perilaku terhadap sasaran yang diharapkan, menjadi 4 kategori diantaranya adalah: (1) Pra-Konflik; (2) Konflik tertutup (*latent*); (3) Konflik permukaan (*emerging*); dan (4) Konflik terbuka (*manifest*). Sementara Suporahardjo (2000) dalam Anshori (2013) mencoba membagi konflik menjadi dua jenis berdasarkan level permasalahannya, diantaranya adalah konflik vertikal dan konflik horizontal. Selanjutnya Fisher et. al. (2001) dalam Muldi (2021) juga menjelaskan bahwa konflik umumnya terjadi secara bertahap dengan variasi situasi. Tahapan terjadinya konflik diantaranya adalah prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat dan pascakonflik.

Selanjutnya sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka

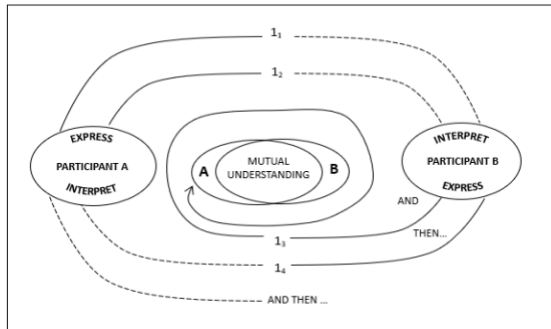
pendekatan pemecahan masalah untuk menjawab permasalahan pertama, digunakan pendekatan pemetaan sosial secara partisipatif melalui FGD dan wawancara mendalam bersama beberapa perwakilan masyarakat dan pemangku kepentingan dilokasi kajian. Melalui pendekatan ini akan diperoleh gambaran bagaimana hubungan dan pengaruh setiap kelembagaan melalui diagram venn kelembagaan dan peta jaringan komunikasi *stakeholders* serta peta jaringan komunikasi kelembagaan yang berperan atau ikut serta dalam konflik yang terjadi pada pembangunan PLTPB di Desa Batukuwung. Dengan pemetaan sosial ini juga diharapkan dapat terungkap berbagai permasalahan hubungan interaksional antara komponen-komponen lingkungan alam dan sosial. Disamping itu, melalui pemetaan ini juga akan dapat memberi informasi *stakeholders* dan kelembagaan yang memiliki kepentingan terhadap sumberdaya tersebut dan bagaimana hubungannya dengan konflik yang terjadi serta bagaimana inisiatif-inisiatif lokal dijalankan untuk mempertahankan sumber daya yang dianggap penting tersebut.

Suharto (2005) menggambarkan pemetaan sosial sebagai proses penggambaran masyarakat yang

sistematik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat, termasuk di dalamnya profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut. Konsep pemetaan sosial sebetulnya berasal dari kata dasar pemetaan, yaitu pengelompokkan objek menurut kategori tertentu serta keterkaitannya satu sama lain. Sementara konsep partisipatif lebih menekankan pada nilai kebersamaan, baik diantara para pihak yang berada pada tingkatan sosial yang sama atau berbeda. Rudito (2008) menyatakan bahwa pemetaan sosial merupakan upaya pengidentifikasi untuk memahami struktur sosial, sistem kelembagaan dan individu beserta masalah dan kebutuhan pada suatu unit komunitas sosial tertentu, serta sumber daya dan kapasitas unit sosial tersebut. Aktivitas dalam pemetaan sosial mencakup: (a) identifikasi masalah dan kebutuhan komunitas; (b) ekspektasi (harapan) komunitas dan kecenderungan perubahannya; (c) identifikasi potensi sumber daya dan modal sosial; (d) identifikasi *stakeholders* dan jaringan kepentingan; serta (e) potensi konflik di dalam masyarakat.

Kemudian pendekatan pemecahan masalah untuk menjawab permasalahan

kedua menggunakan pendekatan model komunikasi konvergen dari Kincaid dan pendekatan model umum komunikasi Gerbner sebagai salah satu pisau analisis dalam penelitian. Berikut ini adalah gambar yang mengilustrasikan model komunikasi konvergen.



**Gambar 1.** Model Konvergensi Komunikasi Kincaid (Flor dan Cangara, 2018).

Gambar tersebut menjelaskan bahwa peserta A berbagi informasi/pesan ( $1_1$ ) terkait sebuah peristiwa atau masalah (peserta A mungkin menyadari/tidak menyadari peristiwa yang disampaikan tersebut) pada peserta B. Kemudian peserta B berusaha memahami dan menginterpretasikan pesan yang disampaikan peserta A sesuai dengan kerangka pikirnya. Selanjutnya peserta B menanggapi dan menciptakan informasi/pesan ( $1_2$ ) untuk dibagikan kembali pada peserta A. Lalu A kembali menafsirkan informasi/pesan ( $1_3$ ) baru tersebut dari peserta B kedalam topik yang sama. Peserta B menafsirkan lagi informasi tersebut dan

mereka melanjutkan pembicaraan tentang topik tersebut ( $1_4...n$ ) sampai salah satu atau keduanya telah puas dan memperoleh saling pengertian satu sama lain tentang peristiwa atau permasalahan yang dibicarakan tersebut (Flor dan Cangara, 2018).

Disamping itu, untuk menjawab permasalahan nomor dua juga digunakan pendekatan model umum komunikasi Gerbner. Dimana dalam jurnal yang berjudul "*Toward a general model of communication*", George Gerbner memperkenalkan model komunikasi umum yang diilustrasikan melalui konstruksi versi model verbal dan grafis. Model verbal tersebut merupakan model yang mampu memberikan penjelasan singkat dan memberikan gambaran suatu peristiwa serta pada saat yang bersamaan dapat mengidentifikasi setiap bagian atau aspek utama pada peristiwa yang berlangsung tersebut. Dimana pada prakteknya apa yang mungkin menjadi deskripsi peristiwa komunikasi merupakan satu mata rantai utuh dalam rantai proses komunikasi. Sedangkan model grafis merupakan model yang dibentuk atau disusun secara skematis yang dapat merepresentasikan posisi, arah dan hubungan secara grafis, sehingga dapat menjelaskan peristiwa

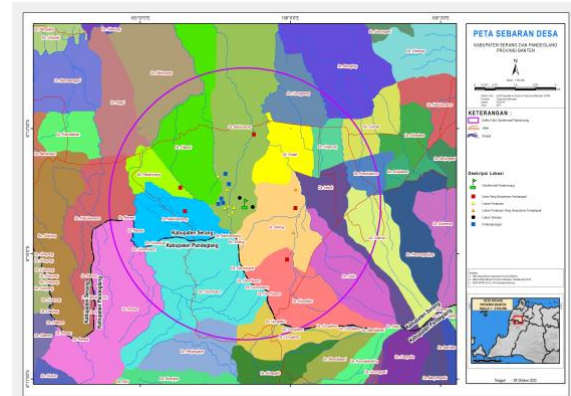
dan konsep yang lebih kompleks secara visual (Gerbner, 1956).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus dan teknik pemetaan social. Suharto (2005) mengemukakan tiga metode dan teknik pada pemetaan sosial, yaitu survey formal, pemantauan secara cepat (*rapid appraisal*) dan metode partisipatoris. Rudito (2008) mengemukakan metode dan teknik pemetaan sosial secara lebih rinci, yaitu: survey, etnografi, analisis jaringan, diskusi kelompok terfokus (FGD) dan metode partisipatif. Sementara paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma Naturalistik. Dimana jenis penelitiannya sendiri adalah penelitian eksploratif (*exploratory*).

Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dimana tempat tersebut merupakan lokasi utama di dirikannya PLTPB, tepatnya di sekitar Kampung Wangun. Sedangkan waktu penelitian dilakukan selama  $\pm$  8 bulan terhitung sejak akhir bulan Oktober 2022 sampai dengan pertengahan bulan

Juni 2023. Berikut ini adalah peta wilayah kajian.



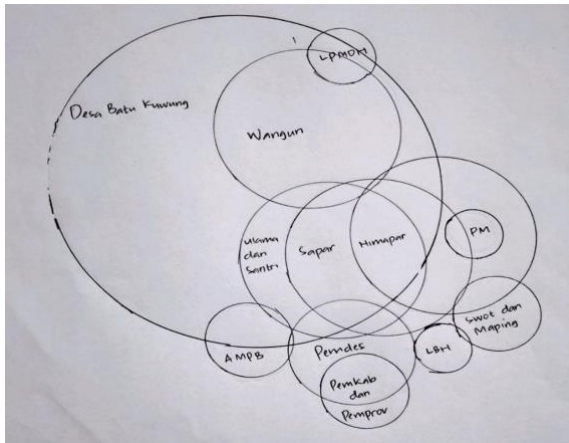
**Gambar 2.** Peta Wilayah Kajian Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang.

## PEMBAHASAN

### 1. Diagram Venn Kelembagaan dan Jaringan Komunikasi pada Konflik Pembangunan PLTPB Batukuwung

Untuk menggambarkan bagaimana hubungan setiap kelembagaan yang berperan aktif dalam konflik pembangunan PLTPB di Desa Batukuwung, maka diilustrasikan pada diagram venn kelembagaan dibawah ini. Dimana pada diagram venn tersebut digambarkan bahwa semakin besar lingkaran pada setiap kelembagaan, mengindikasikan semakin penting dan semakin besar pengaruhnya menurut masyarakat. Sedangkan irisan setiap lingkaran, menggambarkan seberapa besar pengaruh antar lembaga dan lembaga apa saja yang dipengaruhinya

serta seberapa penting lembaga tersebut bagi lembaga yang dipengaruhi.



**Gambar 3.** Diagram Venn Kelembagaan pada Konflik PLTPB di Desa Batukuwung.

Berdasarkan diagram tersebut ruang lingkup wilayah kajian ini adalah Desa Batukuwung, sementara isu yang dibahas adalah konflik yang terjadi dalam pembangunan PLTPB di wilayah tersebut yang melibatkan beberapa kelembagaan. Unit sosial yang dikaji secara lebih dalam adalah Kampung Wangun yang dilihat sebagai sebuah kelembagaan dibawah desa yang berbentuk kelembagaan kampung. Sementara kampung yang lain dideskripsikan sebagai satu kesatuan dengan Desa Batukuwung itu sendiri dimana sebenarnya pengaruhnya hampir merata secara kelembagaan begitupula tingkat kepentingannya.

Jika Desa digambarkan sebagai lingkaran yang paling besar sebagai gambaran dari gabungan 8 kampung

lainnya termasuk kampung Wangun, maka sebagai gabungan 8 kampung ini desa memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi sebenarnya jika dibandingkan dengan kelembagaan yang lain. Bagaimana tidak, proyek ini dilaksanakan di Desa Batukuwung, sehingga desa inilah yang akan paling terdampak dan seharusnya desa ini pula yang memiliki posisi tawar paling tinggi apakah akan menerima atau menolak proyek tersebut. Kemudian dari 8 kampung yang ada tersebut, pembangunan PLTPB ini dilaksanakan di wilayah Kampung Wangun. Dengan demikian, Kampung Wangun sebenarnya yang paling akan terdampak dan juga yang memiliki posisi tawar paling tinggi jika dibandingkan dengan kampung lainnya.

Lalu terdapat 3 lingkaran lain yang memiliki besar yang sama dengan lingkaran Kampung Wangun dan mempengaruhi Kampung Wangun dalam perlawanan menolak pembangunan PLTPB Batukuwung yaitu kelembagaan Sapar (Syarikat Perjuangan Rakyat) Padarincang, Himpar (Himpunan Mahasiswa Padarincang), dan gabungan beberapa pesantren yang digambarkan dengan ulama dan santri. Berdasarkan hasil kajian, pengaruh ketiga kelembagaan ini



cukup kecil terhadap warga di Kampung Wangun, bahkan menurut perwakilan warga, baik Himapar maupun Sapar sendiri kurang begitu dikenal warga dan hanya sebatas tahu saja. Justru kelembagaan yang dikenal oleh warga Wangun adalah LMDH (Lembaga Masyarakat Desa sekitar Hutan) yang merupakan program pemerintah bersama Perhutani. Menurut salah satu anggota LMDH di Kampung Wangun yaitu SS mengatakan bahwa:

“Saya adalah anggota kelompok Lembaga Pendampingan Masyarakat Desa Hutan. LPMDH ini adalah kelompok binaan dari dinas dan Perhutani. Programnya lebih ke program pengembangan pertanian. Sayangnya setiap programnya tidak seluruhnya berjalan lancar. Ada beberapa program yang tidak berjalan baik karena mungkin tidak tepat sasaran. LPMDH ini sudah lama ada ditempat kami.”

Kemudian untuk kelembagaan Sapar yang dibentuk sebagai simbol perlawanan untuk menolak pembangunan PLTPB di Batukuwung, dalam perjalanannya kelembagaan Sapar ini terbentuk dari dua kelembagaan besar yaitu pesantren yang ikut serta terhadap kegiatan penolakan pembangunan PLTPB dan kumpulan

mahasiswa yang tergabung dalam Himapar. Dalam kegiatannya baik Himapar maupun Sapar ini dibantu oleh beberapa kelembagaan lain yaitu PM (Pena Masyarakat) yang sebenarnya adalah kelembagaan yang dibentuk oleh mahasiswa yang ikut serta dalam perjuangan Sapar dan Himapar, kemudian kelembagaan mahasiswa lain yang ikut serta adalah Mapping (Mahasiswa Pinggiran) Banten dan SWOT (Serikat Mahasiswa Sosialis Demokratik).

Baik SWOT maupun Mapping sebenarnya tidak begitu kuat mempengaruhi Sapar karena yang ikut serta hanya perwakilannya saja dan jumlahnya terbatas. Kemudian kelembagaan lain yang juga mempengaruhi perjuangan Sapar dan pesantren ini adalah pemerintah desa setempat. Dimana pemerintah desa ini sebenarnya sama seperti masyarakat terpecah menjadi dua yaitu pemerintah yang mendukung dan menolak pembangunan PLTPB. Kemudian ada juga Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat Banten yang menurut beberapa narasumber ikut terlibat dalam konflik yang terjadi dan termasuk kelompok yang memprotes pembangunan PLTPB Padarincang. Akan tetapi tidak bisa dikategorikan masuk kelompok Sapar

karena dalam perjuangannya masih membawa nama lembaganya yaitu LBH Rakyat Banten.

Di sisi lain, terdapat kelembagaan yang menerima pembangunan PLTPB Batukuwung terutama adalah AMPB (Aliansi Masyarakat Padarincang Bersatu) dimana anggotanya selain dari tokoh agama juga tokoh masyarakat. AMPB ini juga sebenarnya memiliki koneksi dengan pemerintah desa yang mendukung pembangunan PLTPB Batukuwung. Pemerintah desa sendiri tidak dapat sepenuhnya menolak pembangunan mengingat mereka juga harus tegak lurus terhadap instruksi pemerintah di atasnya yaitu pemerintah kabupaten, daerah maupun pusat. Terlebih program PLTPB ini merupakan salah satu program strategis pemerintah.

Terdapat beberapa aktor yang terlibat dalam konflik pembangunan PLTPB di Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang. Dimana setiap aktor ini memiliki kepentingannya masing-masing dan juga membawa kepentingan lembaga yang menaunginya. Meski berdasarkan penuturan narasumber mereka tidak mewakili kelembagaan yang mereka bawa, akan tetapi dalam kenyataannya setiap aktor ini berdiri bukan hanya atas kepentingan pribadi

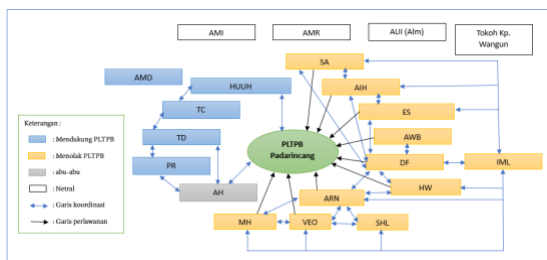
dan masyarakat tetapi juga untuk lembaganya. Berikut adalah aktor-aktor sosial yang terlibat dalam konflik pembangunan PLTPB di Desa Batukuwung.

**Tabel 1.** *Stakeholders* berkepentingan dalam konflik pembangunan PLTPB di Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang.

No	Inisial	Lembaga	Posisi
1	AIH	Pesantren	Ulama Pimpinan
2	SA	Pesantren	Ulama Pimpinan
3	ES	Pesantren	Ulama Pimpinan
4	AWB	LBH Rakyat Banten	LSM
5	DF	Sapar	Tokoh Sapar
6	IML	Anggota Sapar	Tokoh Sapar
7	HW	Mapping dan SWOT	Tokoh Mapping dan SWOT
8	ARN	Himapar	Tokoh Himapar
9	SHL	Himapar	Tokoh Himapar
10	VEO	Mapping	Anggota
11	MH	Pena Masyarakat	LSM
12	AH	Pemdes Batukuwung	Pemerintah
13	PR	Pemdes Batukuwung	Pemerintah
14	TD	Pemdes Batukuwung	Pemerintah
15	TC	AMPB	Tokoh AMPB
16	HUUH	AMPB	Tokoh AMPB
17	AMD	Batukuwung	Tokoh Agama
18	AMI	Pesantren	Ulama pimpinan
19	AMR	Pesantren	Ulama pimpinan
20	AUI	Pesantren	Ulama pimpinan pesantren
21		Tokoh Wangun	

Setiap *stakeholders* pada tabel tersebut, masing-masing membentuk

jaringan dan terhubung satu sama lain, baik yang menolak, yang bersikap netral, maupun yang menerima pembangunan PLTPB tersebut. Jaringan *stakeholders* ini digambarkan dalam bentuk garis koordinasi antar *stakeholders* dan garis perlawanan terhadap pembangunan PLTPB. Berikut ini adalah gambar jaringan *stakeholders* pada konflik pembangunan PLTPB di Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang.



**Gambar 4.** Jaringan *stakeholders* pada konflik pembangunan PLTPB di Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang

Sesuai dengan gambar diatas, terlihat bahwa setiap *stakeholders* ini saling terhubung antara satu sama lain yang ditandai dengan adanya garis koordinasi berwarna biru. Garis tersebut menunjukkan adanya komunikasi antar *stakeholders*. Dimana komunikasi yang terbentuk antara kelompok yang menerima dengan yang menolak sebenarnya berbeda. Sementara warna *orange* pada gambar tersebut menggambarkan kelompok yang menolak pembangunan PLTPB, warna

biru muda menggambarkan kelompok yang menerima pembangunan PLTPB, warna abu-abu menggambarkan *stakeholders* yang tidak ditehau secara pasti apakah menerima atau menolak dan warna putih merupakan orang-orang yang bisa dianggap netral atau sebenarnya orang-orang tersebut tidak tahu atau kurang tahu terhadap permasalahan yang terjadi sehingga tidak bisa/belum bisa memutuskan keberpihakannya pada kelompok manapun. Orang-orang tersebut umumnya adalah ulama dan masyarakat yang tinggal di Kampung Wangun (sebagian besar). Masyarakat dari Kampung Wangun yang wilayahnya menjadi wilayah utama akan terdampak jika pembangunan ini dilanjutkan, tidak bisa memutuskan keberpihakannya karena komunikasi pada mereka terputus baik dari pihak perusahaan pelaksana proyek maupun kelembagaan lain termasuk pemerintah dan mereka tidak memiliki informasi yang lengkap terkait masalah pembangunan PLTPB sehingga mereka kesulitan memutuskan menerima atau menolak pembangunan.

Dilain pihak, AH diberi warna berbeda yaitu abu-abu karena pada awalnya AH ini memihak kelembagaan Sapar dalam memprotes pembangunan PLTPB. Ternyata menurut beberapa

anggota Sapar, keberpihakannya ini dilakukan hanya untuk kepentingan politik. Setelah kepentingan politiknya tercapai, keberpihakan AH terhadap Sapar ini tidak lagi terlihat. Kemudian untuk AMD awalnya pihak yang menolak pembangunan PLTPB, kemudian pindah menjadi pihak yang menerima pembangunan PLTPB. Akan tetapi tidak diketahui tokoh ini masuk ke pihak penerima pembangunan dari aktor sosial yang mana. Akan tetapi aktor ini cukup dikenal oleh anggota Sapar yang lain.

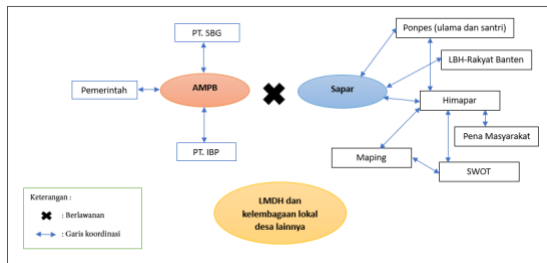
Dalam hal komunikasi antar kelompok, komunikasi antara pihak yang menerima pembangunan dengan yang menolak pembangunan sebenarnya lebih pada komunikasi yang bersifat konfrontasi dimana model konflik yang terbangun masih bersifat laten dan horizontal. Sedangkan model komunikasi antara pihak yang menerima dengan pihak perusahaan pemegang proyek terpusat pada aktor petinggi pemerintah dan aktor sosial yang paling berpengaruh dan bentuknya koordinasi. Sementara komunikasi yang terbangun antara pihak yang menolak pembangunan dengan pelaksana pembangunan bersifat konfrontatif dimana model konflik yang terbangun adalah konflik terbuka. Disamping itu

model komunikasi antar *stakeholders* yang menolak pembangunan lebih bersifat konvergen. Sedangkan komunikasi yang terbangun antar pihak yang menerima lebih bersifat divergen.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap *stakeholders* ini merupakan bagian dari kelembagaan yang menaunginya. Meski berdasarkan kesepakatan bersama dalam Sapar bahwa siapapun yang masuk keanggotaan Sapar, maka tidak boleh membawa-bawa nama organisasinya dalam kelembagaan Sapar. Nyatanya dalam setiap kegiatan aksi, anggota Sapar yang berasal dari organisasi tersebut memobilisasi kawan-kawannya baik dari dalam organisasi tempat dia berasal maupun dari luar organisasi (bisa juga anggota kelembagaan atau organisasi baru yang kemudian akan bergabung sebagai anggota Sapar). Ini membuktikan sebenarnya secara terselubung, Sapar ini terbentuk oleh orang-orang yang berasal lebih dari satu kelembagaan atau organisasi. Meski demikian, kelembagaan selain Sapar yang teridentifikasi sebagai bagian dari Sapar tidak bisa dikatakan bahwa mereka sepenuhnya terlibat, akan tetapi hanya orang-orang tertentu dari kelembagaan tersebut yang terlibat. Hal ini karena kesepakatan antara anggota

Sapar adalah tidak boleh membawa nama lembaganya ke dalam kelembagaan Sapar.

Sama halnya dengan peta jaringan *stakeholders* diatas, peta jaringan kelembagaan ini juga membentuk kelembagaan yang menunjukkan posisi kelompok kelembagaan yang mendukung, menolak dan netral terhadap pembangunan PLTPB di Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang, Provinsi Banten. Adapun peta jejaring kelembagaan yang terlibat dalam konflik ini adalah sebagai berikut.



**Gambar 5.** Jaringan Kelembagaan pada konflik pembangunan PLTPB di Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa setiap kelembagaan ini memiliki garis koordinasi untuk setiap kelompoknya baik kelompok yang menolak maupun kelompok yang menerima. Sementara kelembagaan yang netral yaitu LMDH dan sebenarnya dengan beberapa kelembagaan yang lain di tingkat lokal desa bertindak hanya sebagai penonton atau menyaksikan jalannya konflik. Meski demikian

sebenarnya kelompok yang netral ini juga terkena dampak dari konflik yang terjadi.

Sedangkan untuk kelembagaan yang menolak pembangunan PLTPB terlihat bahwa pusat kelembagaan adalah Sapar. Dimana kelembagaan yang lain memiliki jalur koordinasi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kelembagaan Sapar. Kelembagaan sentral kedua adalah Himapar. Hal ini karena sebagian besar aktivis maupun mahasiswa yang terlibat selain mayoritas dari Padarincang (baik di dalam maupun luar Desa Batukuwung) juga aktivis yang terlibat ini juga umumnya awalnya berkeanggotaan Himapar. Kelembagaan atau komunitas yang lain umumnya ikut serta karena ajakan dari kelembagaan Himapar ataupun juga yang menawarkan diri untuk masuk dalam keanggotaan Sapar. Kemudian untuk pihak yang menerima pembangunan PLTPB di duga perlawanannya terpusat di AMPB.

## 2. (JADI NO 2) Skema komunikasi antar pihak yang berkonflik dan masyarakat terdampak pembangunan PLTPB Batukuwung

Di dalam meyakinkan warga terkait keamanan dan dampak positif yang akan

ditimbulkan dari pembangunan PLTPB di Batukuwung, pihak perusahaan pelaksana proyek melakukannya dengan cara memberikan informasi pada masyarakat dengan cara menggambarkan atau mengilustrasikan seperti apa perusahaan ini akan dibangun, bagaimana keberhasilan kedepan, dan keuntungan-keuntungan apa yang akan di terima masyarakat dengan memberikan contoh-contoh pembangunan di tempat lain yang sudah berhasil. Dengan cara ini diharapkan masyarakat dapat membayangkan apa yang akan terjadi (dampak positif) sesuai dengan persepsi pihak perusahaan yang menyampaikan pesan (informasi) dengan cara mendeskripsikan persepsi tersebut berdasarkan contoh pembangunan PLTPB yang sudah berhasil dan dilihat pihak perusahaan (pemberi pesan). Harapannya masyarakat sebagai penerima informasi ikut serta merasakan dan meyakini kebenaran tentang apa yang dipaparkan pihak perusahaan, sehingga diakhir diharapkan dapat memberikan keputusan menerima pembangunan proyek PLTPB. Cara yang dilakukan perusahaan ini sangat sesuai dengan model umum komunikasi George Gerbner. Dimana menurut Gerbner

bahwa proses komunikasi terjadi pada saat komunikator atau komunikan mempersepsikan suatu peristiwa dan bereksi dalam suatu situasi, dengan menggunakan alat atau saluran tertentu agar sesuatu yang disampaikan itu menjadi ada, dalam bentuk dan konteks tertentu, dengan arti tertentu dan dengan tujuan memperoleh suatu akibat atau hasil tertentu.

Pada awalnya cara yang dilakukan perusahaan ini berhasil dan dibuktikan dengan mulai beroperasinya perusahaan. Kegiatan yang dilakukan perusahaan setelah berhasil adalah persiapan lahan untuk bangunan pabrik dan pengeboran serta pembangunan jalan. Di tengah-tengah pembangunan, terjadi musim hujan dan karena adanya pembukaan lahan ini menyebabkan material bekas penebangan dan lumpur yang dihasilkan pada saat pembukaan jalan masuk ke sungai Cikoneng dan menutup aliran sungai. Akhirnya terjadilah banjir di pemukiman masyarakat dan mengakibatkan juga terganggunya lahan pertanian masyarakat. Akibat hal ini persepsi dan keyakinan masyarakat menjadi berubah karena menurut masyarakat kejadian tersebut tidak sesuai dengan yang diceritakan perusahaan saat sosialisasi. Karena peristiwa ini juga akhirnya

berujung pada aksi protes masyarakat yang menuntut agar perusahaan menghentikan kegiatannya.

Untuk mengatasi masalah ini, serangkaian dialog dan sosialisasi untuk meyakinkan masyarakat kembali dilakukan dengan model komunikasi yang dikembangkan sama dengan sebelumnya. Kemudian untuk lebih meyakinkan warga dilakukan pula studi banding. Sayangnya studi banding ini tidak efektif karena yang diajak hanya sebagian kecil masyarakat dan yang ikut serta ini juga tidak mampu meyakinkan masyarakat lain tentang apa yang dia lihat saat studi banding. Sementara di lain pihak, masyarakat dari beberapa elemen terutama dari kalangan ulama, santri dan aktivis mahasiswa membentuk kelembagaan Sapar agar gerakan penolakan terhadap perusahaan ini menjadi lebih terkoordinasi dan tertata rapih.

Hal yang sama juga diterapkan pihak Sapar dalam mengedukasi masyarakat. Mengingat PLTPB ini masih asing bagi masyarakat, maka model komunikasi seperti yang diterapkan pihak perusahaan pada masyarakat sebenarnya sama dengan yang dilakukan juga oleh Sapar. Hanya bedanya, tujuan Sapar ini adalah untuk mengedukasi sehingga informasi yang disampaikan

pada masyarakat lebih detail, terbuka dimana informasi yang disampaikan tujuan akhirnya adalah masyarakat dapat memperoleh gambaran fakta sebenarnya jika perusahaan terus beroperasi dan mampu memberikan keputusan menerima atau menolak perusahaan. Berbeda dengan pihak perusahaan yang tujuan akhirnya adalah agar masyarakat menerima pembangunan PLTPB yang mereka rencanakan.

Pemahaman masyarakat menjadi semakin berkembang terkait bagaimana dampak yang mungkin akan ditimbulkan dari pembangunan PLTPB karena kelembagaan Sapar ini selain memiliki agen perubahan seperti yang telah diceritakan sebelumnya untuk memperkuat Sapar baik secara internal maupun eksternal juga membuka ruang diskusi dalam rangka bertukar pengalaman dan shareing informasi. Terbukanya akses media internet dan semakin luasnya jaringan yang dikembangkan Sapar, informasi ini semakin meningkat. Dalam prakteknya, Sapar selalu memposisikan setiap anggota maupun masyarakat dari luar secara sama dan tidak membedakan. Inilah yang kemudian membuat orang-orang dari luar juga tertarik untuk ikut serta terutama yang

memiliki hubungan emosional terhadap lingkungan. Ruang diskusi ini terbuka bagi setiap anggota kapanpun dibutuhkan.

Seperti penjelasan sebelumnya, jika dilihat berdasarkan model komunikasi konvergen dari Kincaid, sebenarnya secara tidak langsung Sapar menggunakan model komunikasi ini. Sedangkan perusahaan menerapkan hal sebaliknya. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana mereka memberi informasi pada masyarakat, kemudian pada saat memberikan penjelasan atau sosialisasi dilakukan dengan cara menyelenggarakan symposium yang dihadiri para ahli atau diskusi dengan mendatangkan ahli untuk meyakinkan masyarakat. Cara ini sebenarnya secara tidak langsung memposisikan masyarakat sebagai orang yang tidak tahu (berada di tingkatan pengetahuan yang rendah) dan dipaksa menerima kebenaran menurut pihak perusahaan dan pemberi materi. Cara ini secara psikologi akan melahirkan penekanan pada diri penerima informasi yang pada akhirnya malah memunculkan keraguan dan penolakan. Karena model komunikasi seperti ini lebih bersifat linier atau searah sehingga penerima informasi diposisikan sebagai pihak

yang bergantung pada pemberi informasi.

Kemudian bentuk komunikasi yang dibangun perusahaan juga lebih tertutup, target sasarannya lebih mengutamakan para pemuka pendapat yang dinilai akan menolak atau mengganggu jalannya kegiatan proyek dan lebih bersifat *top down*. Hal ini dibuktikan dengan apa yang diutarakan warga Wangun saat FGD dilakukan bahwa komunikasi dengan warga menjadi terputus, dan berbagai pertanyaan maupun tuntutan warga seolah dilupakan sampai saat ini. Ini jugalah yang kemudian memunculkan kekecewaan warga terhadap perusahaan. Keyakinan warga bahwa perusahaan ini akan merugikan jika terus beropansi semakin tinggi dan mereka yang awalnya ragu antara menolak atau menerima menjadi memiliki keputusan untuk menolak. Bahkan yang tadinya berkomitmen untuk menerima saja berubah menjadi menolak karena perilaku yang dilakukan oleh oknum perusahaan tersebut.

## SIMPULAN

Dalam konflik pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Desa Batukuwung terdapat lebih dari satu kelembagaan yang



berperan serta dalam terjadinya konflik yang saling mempengaruhi dan membentuk group konflik berdasarkan kepentingan setiap kelompok. Pada awalnya konflik terjadi antara perusahaan dengan warga Kampung Wangun, kemudian cakupan konflik ini meluas sampai ke level desa Batukuwung, kecamatan dan akhirnya melibatkan kelembagaan-kelembagaan sosial baik di dalam wilayah provinsi maupun diluar Provisini Banten. Setiap kelembagaan yang dibawa oleh beberapa *stakeholders* berkepentingan sebagai representasi dari kelembagaan yang menaunginya kemudian membentuk kelompok atau group konflik sesuai dengan tujuannya masing-masing. Selain itu terdapat juga kelembagaan-kelembagaan tertentu maupun *stakeholders* tertentu yang berdiri diluar konflik sebagai kelompok yang menyatakan dirinya sebagai kelompok yang netral atau tidak berpihak dalam terjadinya konflik. Kelompok yang menolak pembangunan PLTPB direpresentasikan oleh kelembagaan Sapar (Sarekat Perjuangan Rakyat) Padarincang dan kelompok yang menerima pembangunan PLTPB direpresentasikan oleh kelembagaan AMPB (Aliansi Masyarakat Padarincang Bersatu).

Alur skema komunikasi yang diterapkan oleh setiap pihak yang berkonflik berbeda-beda dan ternyata mempengaruhi epektifitas komunikasi yang dijalankan dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hasil kajian, nampak bahwa pihak yang mendukung pembangunan PLTPB menerapkan model komunikasi divergen dan berbentuk linear. Sedangkan pihak yang menolak pembangunan PLTPB menerapkan model komunikasi konvergen yang menempatkan setiap pihak pada posisi yang sejajar, lebih partisipatif dan memberikan kebebasan pada setiap anggotanya untuk berkomunikasi dan menyampaikan pendapatnya dalam berbagai forum diskusi. Sementara model umum komunikasi ini diterapkan oleh setiap pihak baik yang menolak maupun yang menerima. Hanya saja perbedaannya model ini diterapkan oleh pihak yang menerima PLTPB secara lebih tertutup dan isu-isu yang menurut mereka penting serta dapat memperlancar jalannya proyek saja yang dikomunikasikan. Sementara pihak yang menolak proyek, menerapkan model umum komunikasi Gerbner ini secara lebih terbuka, transparan dan tidak ada informasi yang dibatasi.

Kemudian, mengingat konflik yang terjadi cukup kompleks dan cukup

banyaknya kelembagaan maupun *stakeholders* berkepentingan yang terlibat, maka resolusi konflik harus dilakukan dengan cara menyesuaikan dengan konflik yang terjadi dan mempertimbangkan kondisi sosial budaya dimana konflik itu terjadi. Sesuai dengan hasil kajian bahwa alur skema komunikasi yang direkomendasikan untuk dijalankan oleh pihak perusahaan dan pemerintah terhadap masyarakat adalah model komunikasi konvergen yang menempatkan setiap pihak secara sejajar, lebih partisipatif, terbuka, tidak ada yang ditutupi atau bersifat pembohongan publik serta tidak dibatasi. Dengan cara ini diharapkan hubungan komunikasi yang harmonis serta saling pengertian akan terwujud sehingga akan mengarahkan setiap pihak untuk bersama-sama melakukan resolusi atas konflik yang sedang terjadi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, A. 2014. *Modul Participatory Action Research (PAR)*, (Surabaya: LPM IAIN Sunan Ampel) hal. 91
- Anshori, M. Afif. 2013. *Pemetaan Resolusi Konflik di Lampung (Sebuah Penelitian Awal)*. Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung.
- Dewi, Susi Fitria. 2019. *Teori, Metode dan Strategi Pengelolaan Konflik Lahan*. Padang: CV. IRDH.
- Flor, Alexander G. dan Cangara, Hafied. 2018. *Komunikasi Lingkungan, Penanganan Kasus-kasus Lingkungan Melalui Strategi Komunikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Gerbner, George. 1956. *Toward A General Model Of Communication*. *Audio-Visual Communication Review*, 171 – 199.
- Hapsari, Hesti dan Cahyono, Agung Budi. 2014. *Pemetaan Partisipatif Potensi Desa (Studi Kasus: Desa Selopatak, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto)*. *Jurnal GEOID*, 10 (1), 99-103.
- Harahap, Mailina, *et.al.*, 2020. *Pemetaan Potensi Desa Upaya Peningkatan Sosial Ekonomi Pertanian Desa Lubuk Kertang Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat*. *Journal of Agribusiness Sciences*, 4 (1), 8-14.
- Jannah, Raudatul, *et.al.*, 2022. *Konflik Dalam Perspektif Sistem Kepercayaan: Studi Kasus Diskriminasi Minor Agama Baha'i Di Kabupaten Pati, Jawa*

- Tengah. Jurnal Kewarganegaraan, 6 (1), 2103-2108.
- Kamim, Anggalih Bayu Muh., et.al., 2018. Dilema Pemetaan Partisipatif Wilayah Masyarakat Adat di Indonesia: Upaya Resolusi Konflik Agraria dan Kritiknya. Prosiding Senas POLHI ke-1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang.
- Littlejohn, Stephen W. dan Stephen W. 2009. *Encyclopedia of communication theory*. Sage Publications Ltd. 1 Oliver's Yard 55 City Road London, EC1Y 1SP United Kingdom.
- Mahanani, Amelia Paramitha, et.al., 2020. Pemetaan Partisipatif melalui Transek di Desa Muktisari, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka (*Participatory Mapping through Transects in Muktisari Village, Cingambul District, Majalengka Regency*). Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat, 2 (4), 596-601.
- Muldi, Ail. 2021. Model Komunikasi Dalam Pengelolaan Konflik Geotermal Di Kabupaten Serang. Jurnal Riset Komunikasi, 1 (10), 117-134.
- Putikasari, Vella, et.al., 2014. Analisis Perubahan Penutupan Lahan dan Faktor Sosial Ekonomi Penyebab Deforestasi di Cagar alam Kamojang. Jurnal Media Konservasi, 19 (2), 126-140.
- Rifadi, Elfa, et.al., 2019. Pengelolaan Konflik Dan Pemetaan Blok Pemanfaatan Bersama Masyarakat Di KHDTK Loa Haur, Kalimantan Timur. Jurnal Agrifor, XVIII (2), 405-420.
- Rudito, Bambang. 2008. *Social Mapping*. Bandung. Rekayasa Sains.
- Sugiono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial sn Pekerjaan Sosial. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Takdir, Mohammad. 2017. Identifikasi Pola-Pola Konflik Agama dan Sosial (Studi Kasus Kekerasan Berbasis Sektarian dan Komunal di Indonesia). jurnal Ri'ayah, 2 (1), 45-64.

Tuwu, Darmin. 2018. Konflik, Kekerasan dan Perdamaian. Kendari. Literacy Institute.

Wahyudi. 2021. Teori Konflik dan Penerapannya pada Ilmu-ilmu Sosial. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.